



**BAPPEDA  
PROVINSI LAMPUNG**

# **EVALUASI RKPD TRIWULAN 2 2024**



## **Kata Pengantar**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2024 telah dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan dokumen ini menjadi salah satu bahan atau dasar dilakukannya perubahan dokumen RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024. Rekomendasi atau kesimpulan yang dihasilkan dalam dokumen ini juga akan menjadi arahan pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk meningkatkan capaian kinerja, baik output maupun keuangan sehingga target kinerja tahunan maupun lima tahunan dapat dicapai sesuai dengan waktu dan target yang direncanakan.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan dokumen ini, untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan sangat diharapkan. Semoga dokumen ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung,      Agustus 2024

TIM PENYUSUN

# Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Grafik .....	v
Daftar Gambar.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Metodologi.....	4
1.5 Sistematika .....	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PROVINSI LAMPUNG SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024 .....</b>	<b>6</b>
2.1 Tinjauan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024.....	6
2.2 Realisasi Pendapatan Provinsi Lampung Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2024 9	
2.3 Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan Daerah.....	10
2.4 Kinerja RKPD Provinsi Lampung Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2024 .....	23
<b>BAB III KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN EVALUASI RKPD PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN I TAHUN 2024.....</b>	<b>64</b>

## **Daftar Tabel**

Tabel 2. 1 Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024.....	7
Tabel 2. 2 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 terhadap Misi Perubahan RPJMD Tahun 2019 - 2024 .....	8
Tabel 2. 3 Target dan Capaian Indikator Makro Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 .....	11
Tabel 2. 4 Realisasi Fisik Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 ...	23
Tabel 2. 5 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2024 .	27

## Daftar Grafik

Grafik 2. 1 Realisasi Pendapatan Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2024 terhadap target pendapatan Tahun 2024.....	10
Grafik 2. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 .....	12
Grafik 2. 3 Capaian Kinerja Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 .....	13
Grafik 2. 4 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung .....	14
Grafik 2. 5 Capaian Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 .....	16
Grafik 2. 6 Capaian Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2023.....	17
Grafik 2. 7 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (SP2020) Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2023.....	18
Grafik 2. 8 Capaian PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah) Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2023.....	20
Grafik 2. 9 Capaian Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2023 .	21
Grafik 2. 10 Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2023 .....	22

## Daftar Gambar

Gambar 2. 1 Tingkat Inflasi Provinsi Lampung berdasarkan Kelompok (y-o-y)..... 13

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Dalam suatu siklus perencanaan, diperlukan proses evaluasi sebagai suatu penilaian atas pelaksanaan dari hal-hal yang telah disusun dalam dokumen perencanaan. Tahap perencanaan (*ex-ante*), diikuti oleh tahap pelaksanaan (*on-going*) dan diakhiri tahap pasca-pelaksanaan (*ex-post*) untuk kembali lagi menjadi masukan bagi tahap perencanaan, sehingga menjadi suatu siklus yang saling berkaitan. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi perlu mengikuti siklus manajemen tersebut. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, definisi dari pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil dari realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif. Disebutkan juga bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan setiap triwulan berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga dilaksanakan setiap triwulan.

Dokumen ini akan memberi gambaran mengenai efektifitas pelaksanaan perencanaan hingga tahap pelaksanaan yang pada akhirnya memberi nilai strategis yang penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan ditentukan kedepannya berkaitan dengan usulan kegiatan dari masyarakat dan, usulan kegiatan dari OPD dalam musrenbang, serta kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Usulan kegiatan aspirasi dari masyarakat serta melibatkan para pemangku jabatan (stakeholders) yang terlibat dalam penyusunan RKPD merupakan bentuk perencanaan

*bottom up* dan *partisipatif* , serta mengakomodasi substansi – substansi perencanaan pembangunan yang menjadi arah pembangunan nasional terselenggara secara seksama merupakan bentuk dari perencanaan top down dan teknokratis. Usulan kegiatan/ aspirasi yang disampaikan harus mempunyai keterkaitan terkait arah pembangunan yang ingin dicapai, baik dalam tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Oleh sebab itu, proses evaluasi menjadi penting untuk dilakukan agar dapat diidentifikasi capaian realisasi dari berbagai target makro dan sektoral pembangunan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat capaian target makro dan sektoral pembangunan tersebut. Selain itu, keluaran dari tahapan evaluasi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perubahan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025.

## **1.2 Dasar Hukum**

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan evaluasi RKPD 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44)
4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021.
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021.
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021.
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 22 September tahun 2021 tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 tahun 2021 tanggal 22 September tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2024 ini, bertujuan untuk :

1. Mengetahui capaian kinerja dari masing-masing perangkat daerah;
2. Merumuskan langkah-langkah antisipatif agar target kinerja makro dan sektoral pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat tercapai.

Sedangkan tujuan dilaksanakannya evaluasi hasil terhadap Pelaksanaan RKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi realisasi antara rencana program/kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Provinsi Lampung Tahun 2024;
2. Mengevaluasi realisasi penyerapan dana program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Provinsi Lampung dengan laporan realisasi APBD Provinsi Lampung Tahun 2024;
3. Mengetahui faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau terlampauinya target kinerja program/kegiatan;
4. Memberi masukan atas kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

### **1.4 Metodologi**

Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 (Pasal 261), evaluasi penilaian hasil pelaksanaan RKPD Provinsi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Provinsi. Dengan demikian metode evaluasi RKPD Tahun 2024 dilakukan melalui pencermatan dan pendalaman atas capaian Renja Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 yang dikumpulkan kepada Bappeda. Selain itu, penilaian juga dilakukan dengan membandingkan dokumen RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan dokumen APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024, khususnya terkait beberapa hal sebagai berikut :

1. Konsistensi antara program dan kegiatan  
Konsistensi antara program, kegiatan dan sub-kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan program, kegiatan dan sub-kegiatan yang ada dalam APBD

Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dalam dokumen perencanaan, baik RKPD maupun Renja PD;

2. Indikator Kinerja

Kesesuaian antara indikator kinerja yang ada dalam dokumen APBD dengan yang tercantum dalam dokumen RKPD/Renja PD;

3. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan

a) Realisasi penyerapan anggaran program (rupiah), kegiatan dan sub-kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPD Provinsi Tahun 2024.

b) Realisasi kinerja *output* dan *outcome* (k) rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan dalam RKPD Provinsi berdasarkan capaian kinerja kegiatan dalam APBD Provinsi Lampung Tahun 2024.

Selain itu evaluasi ini juga mengukur tingkat capaian indikator makro pembangunan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan isu-isu strategis yang senantiasa berkembang sehingga mempengaruhi capaian kinerja RKPD Tahun 2024.

## 1.5 Sistematika

Dokumen hasil Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Dasar Hukum

1.4. Metodologi

1.5. Sistematika Penulisan

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD PROVINSI LAMPUNG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

2.1. Tinjauan Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024

2.2. Realisasi Pendapatan Provinsi Lampung sampai dengan triwulan II Tahun 2024

2.3. Evaluasi Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah

2.4. Kinerja RKPD Provinsi Lampung Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PROVINSI LAMPUNG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

### **2.1 Tinjauan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024**

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 yaitu : “Pemantapan Transformasi Ekonomi Dankualitas Sdm Menuju Rakyat Lampung Berjaya”. Tema tersebut dijabarkan ke dalam Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan fokus sebagai berikut :

- a) Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;
- b) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- c) Pembangunan Infrastruktur;
- d) Reformasi Birokrasi;
- e) Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya;
- f) Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024. Dengan demikian RKPD Provinsi Lampung tahun 2024 mencerminkan komitmen daerah dalam mewujudkan capaian pembangunan tahun 2024. Pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah turut mengambil peran dalam upaya pemulihan dan penguatan perekonomian, kesehatan dan sosial pasca pandemic Covid 19.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan bauran hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan tantangan perekonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta sinergi pembangunan antara daerah dan nasional; sasaran makro pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 diarahkan pada: nasional; sasaran makro pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 diarahkan pada :

Tabel 2. 1 Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung  
Tahun 2024

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2024	INDIKATOR KINERJA MAKRO	TARGET RKPD 2024
<b>SASARAN MAKRO</b>	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	4,5-5,5
	INFLASI (%)	3±1
	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	45-46
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0-3,8
	Tingkat Kemiskinan (%)	11,4-10,9
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,6-70,9
	Indeks Gini	0,293-0,314
	Nilai Tukar Petani (NTP)	105-106
	Pertumbuhan PAD	8,47
	Kemantapan Jalan Provinsi (%)	78
	Penurunan Presentase Emisi Gas Rumah Kaca	7,29

Sumber : RKPD Provinsi Lampung 2024

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mengacu pada sasaran pokok sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 serta dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional; Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2024 maupun program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya, penyesuaian prioritas pembangunan RKPD 2024 terhadap Visi dan Misi Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 terhadap Misi Perubahan RPJMD Tahun 2019 - 2024

No	Misi Gubernur Lampung Tahun 2019-2024	Prioritas RKPD 2024	Sasaran RKPD 2024	
1	Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.	Kehidupan yang Religius, Aman, Berbudaya dan Inovatif	a	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
			b	Meningkatkan kualitas demokrasi di daerah
			c	Meningkatnya pelestarian budaya dan pemanfaatan budaya
2	Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik	Reformasi Birokrasi	a	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi
3	Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	a	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
			b	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah
			c	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
			d	Meningkatnya pengarusutamaan gender
			e	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak
4	Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah	Pembangunan Infrastruktur	a	Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi
			b	Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah
			c	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi

No	Misi Gubernur Lampung Tahun 2019-2024	Prioritas RKPD 2024	Sasaran RKPD 2024	
5	Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan	Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	a	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi
			b	Meningkatkan kesejahteraan petani
			c	Menjaga stabilitas harga
			d	Menurunnya Kemiskinan
6	Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	a	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
			b	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca
			c	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

Sumber : RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, prioritas pembangunan daerah tahun 2024 selaras dengan keenam misi pembangunan daerah yang tercantum pada perubahan RPJMD 2019-2024. Selanjutnya, prioritas pembangunan tahun 2024 telah pula ditentukan sasaran yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan daerah.

## 2.2 Realisasi Pendapatan Provinsi Lampung Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Penetapan target pendapatan tahun 2024 melihat pada perkembangan ekonomi Provinsi Lampung. Berikut realisasi pendapatan Provinsi Lampung sampai dengan triwulan II tahun 2024 terhadap target tahun 2024 :

Grafik 2. 1 Realisasi Pendapatan Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2024 terhadap target pendapatan Tahun 2024



Sumber : Bapenda Provinsi Lampung 2024

### 2.3 Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan Daerah

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung mengalami perubahan pada Tahun 2021. Terdapat penambahan indikator makro dari 9 indikator makro menjadi 11 indikator makro pembangunan Provinsi Lampung yang harus dicapai. Penetapan indikator makro pembangunan daerah pada dokumen RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran pencapaian berbagai program dan kegiatan pembangunan pemerintah pada tahun berjalan. Untuk keperluan tersebut, diperlukan pengukuran/evaluasi secara triwulan atas target yang telah tercantum pada dokumen RKPD Tahun 2024. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat realisasi dan prediksi ketercapaian target tersebut pada akhir tahun anggaran. Kondisi masih adanya pandemic covid-19 yang masih berlangsung, dinamika global yang terjadi serta roda perekonomian yang berangsur pulih dan stabil, perlu disusun berbagai upaya yang efektif dan efisien dengan pendekatan struktural dan sistematis agar target indikator makro pembangunan dapat tercapai.

Selain itu terdapat mekanisme RKPD Perubahan yang memungkinkan dilakukannya revisi atas target-target makro tersebut. sehingga pendekatan program dan kegiatan yang akan dilakukan lebih realistis dan memiliki dampak yang positif terhadap



tingkat kesejahteraan masyarakat..Revisi ini yang kemudian berakibat pada penyesuaian pada volume dan pagu kegiatan, termasuk dimungkinkan munculnya beberapa kegiatan baru dalam upaya melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu diperlukan suatu proses untuk mengevaluasi sejauhmana program dan kegiatan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah berjalan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, dan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Berikut disajikan data target 11 indikator makro pembangunan tahun 2024 Provinsi Lampung, beserta tingkat capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 2. 3 Target dan Capaian Indikator Makro Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024**

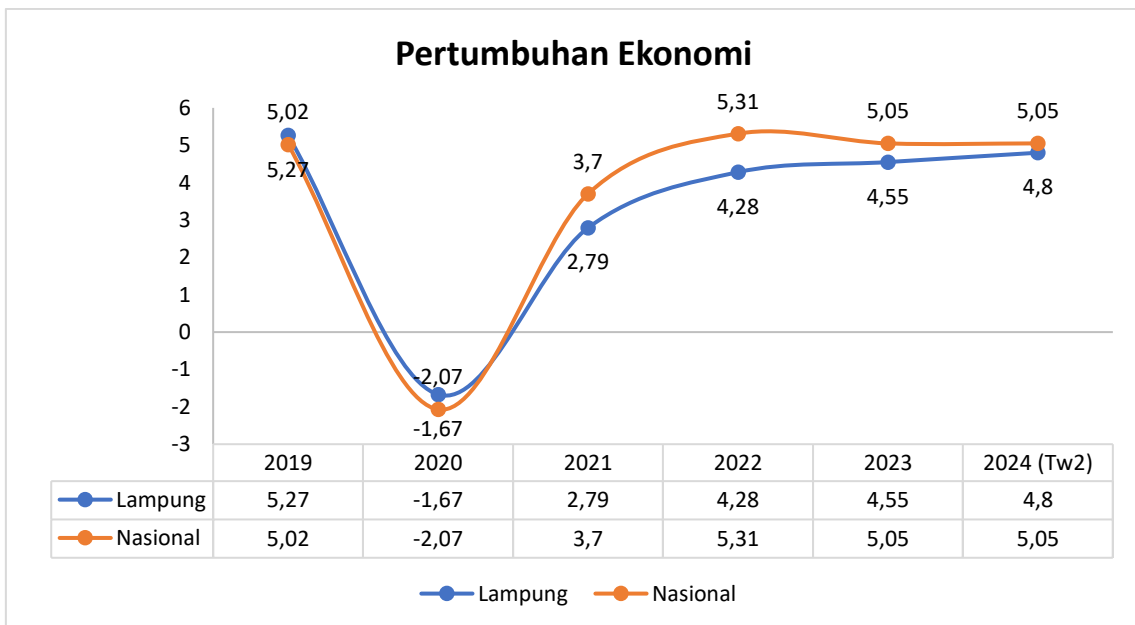
INDIKATOR KINERJA MAKRO	TARGET RKPD 2023	CAPAIAN TRIWULAN I 2024	CAPAIAN TAHUN 2023	KETERANGAN
PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	4,5-5,5	4,8	4,55	Capain Pertumbuhan Ekonomi TW II Y to Y 2024
INFLASI (%)	3±1	2,55	3,47	Capaian Inflasi sampai dengan Juli 2024 Y to Y
PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	45-46		48,2	Belum Rilis
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0-3,8	3,45	4,23	Capaian Febuari 2024
Tingkat Kemiskinan (%)	11,4-10,9		11,11	Belum Rilis
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,6-70,9		72,48	Belum Rilis
Indeks Gini	0,293-0,314	0,302	0,324	Capaian Bulan Maret 2024
Nilai Tukar Petani (NTP)	105-106	128,94	109,25	Capaian NTP bulan Juli 2024
Presentase Peningkatan PAD	8,47	1,8	2,75	Capaian TW II y-o-y 2024
Kemantapan Jalan Provinsi (%)	78		78,67	Belum Rilis
Penurunan Presentase Emisi Gas Rumah Kaca	7,29		14,92	Belum Rilis

Sumber : RKPD Provinsi Lampung dan BPS Tahun 2024.

Dari 11 (sebelas) indikator makro pembangunan di atas, terdapat 6 (enam) indikator yang belum menampilkan data terbaru, yaitu; PDRB perkapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Penurunan Presentase Emisi Gas Rumah Kaca dan Kemantapan jalan Provinsi. Sehingga berdasarkan Tabel 2.3 di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung terus mengalami penguatan sejalan dengan upaya pemulihan perekonomian. Pada Triwulan II-2024 sebesar 4,80% (yoy) tercatat menguat jika dibandingkan dengan pertumbuhan Triwulan II-2023 yang hanya sebesar 4,00%. Dari sisi lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan; Jasa Lainnya; dan Jasa Perusahaan tumbuh masing-masing sebesar 15,19 persen; 9,89 persen; dan 9,44 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,20 persen.

**Grafik 2. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024**



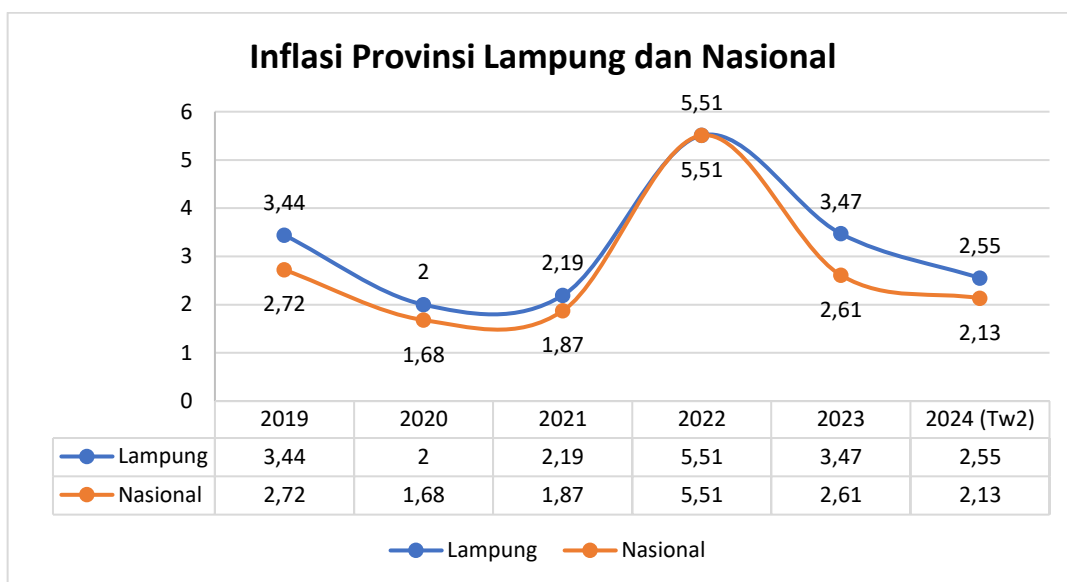
Sumber : BPS Provinsi Lampung 2024

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan II-2024 dibanding triwulan I-2024 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 9,71 persen, menguat dibandingkan triwulan I-2024 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,24 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 33,57 persen. Dari sisi pengeluaran, Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang tumbuh sebesar 17,31 persen.

2. Tingkat Inflasi di Provinsi Lampung merupakan rata-rata dari tingkat inflasi di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Timur dan Mesuji. Secara tahunan,

inflasi Provinsi Lampung pada TW I-2024 (Inflasi Bulan Maret 2024), sebesar 2,55% (yoy), lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang sebesar 2,13%. Andil inflasi bulanan Provinsi Lampung Triwulan II (m-to-m) yaitu sebesar 0,16% persen.

Grafik 2. 3 Capaian Kinerja Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



Sumber : BPS Provinsi Lampung 2024

Gambar 2. 1 Tingkat Inflasi Provinsi Lampung berdasarkan Kelompok (y-o-y)

Rincian	Inflasi y-on-y	Andil Inflasi y-on-y
<b>Inflasi Umum</b>	<b>2,55</b>	<b>2,55</b>
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	5,45	1,76
2. Pakaian dan Alas Kaki	3,19	0,21
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,25	0,03
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,8	0,05
5. Kesehatan	-0,02	0,00
6. Transportasi	0,91	0,10
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,37	-0,02
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-0,51	-0,01
9. Pendidikan	2,39	0,15
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,93	0,08
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	3,17	0,20

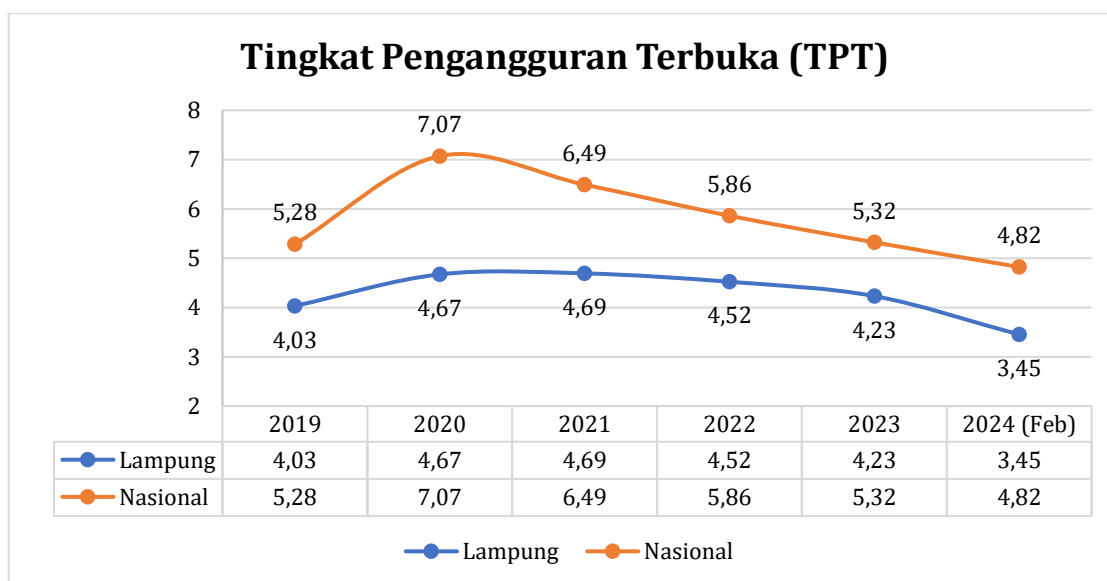
Sumber : BPS Provinsi Lampung 2024

Berdasarkan penghitungan inflasi tahun kalender, Juli 2024 mengalami inflasi sebesar 0,37%. Selanjutnya, dari 4 kota pemantauan di Lampung pada Juli 2023, Kota Bandar Lampung mengalami inflasi sebesar 2,18% persen, Kota Metro mengalami inflasi sebesar 1,99% persen, Kabupaten Lampung Timur mengalami inflasi sebesar 3,63% dan Sedangkan Mesuji mengalami inflasi sebesar 1,73%. Inflasi terbesar yaitu dari kelompok makanan,minuman dan tembakau sebesar 5,45% persen, terutama pada komoditas rokok kretek filter dan beras, kemudian dari kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,19% persen.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja, sehingga dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

Berikut capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 :

Grafik 2. 4 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung  
Tahun 2019 - 2024



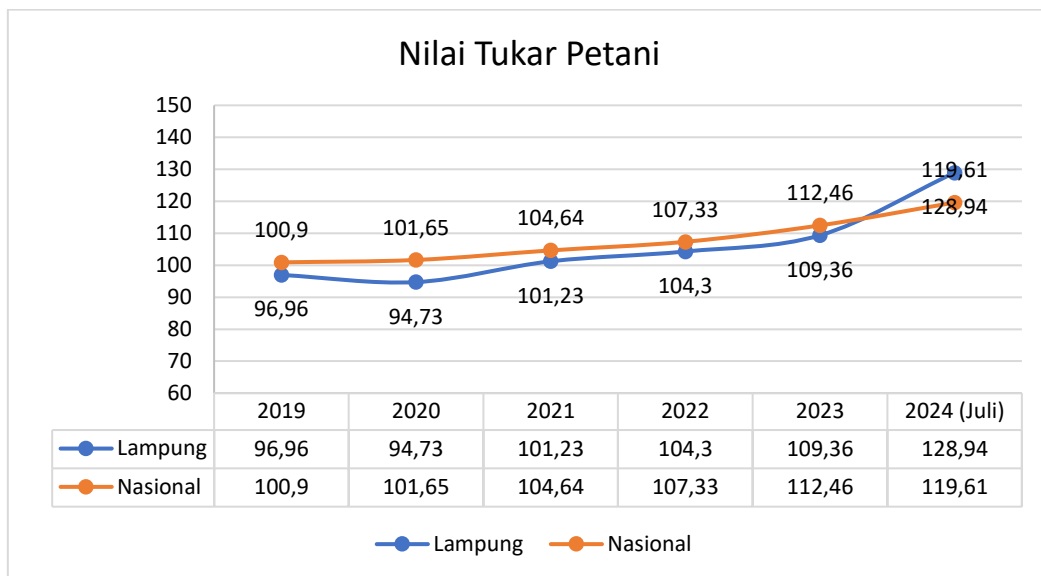
Sumber : BPS 2024

Tingkat pengangguran dapat mencerminkan keadaan perekonomian di suatu wilayah. Apabila perekonomian baik, maka banyak tersedia lapangan pekerjaan yang dengan sendirinya akan mengurangi pengangguran. TPT Provinsi Lampung pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 4,12 turun, sebesar 0,06 persen poin dibandingkan dengan Februari 2023. Untuk capaian TPT Nasional pada Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 4,82%. Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian TPT Provinsi Lampung lebih rendah dari pada TPT pada capaian Nasional.

4. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio antara Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (IT) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (IB). NTP merupakan ukuran hubungan harga. memberikan indikasi secara umum mengenai daya beli komoditas/produk pertanian terhadap barang dan jasa yang saat ini dibeli oleh petani baik untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal, sehingga NTP menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan petani serta dapat menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan produk lain. Ada tiga angka NTP, yaitu :
- a)  $NTP > 100$  menunjukkan petani mengalami surplus dimana harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya, sehingga pendapatan petani naik lebih besar daripada pengeluarannya.
  - b)  $NTP < 100$  menunjukkan petani mengalami defisit dimana harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga konsumsinya, sehingga pendapatan petani turun, lebih kecil daripada pengeluarannya.
  - c)  $NTP = 100$  menunjukkan petani mengalami impas dimana kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya, sehingga pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.

Berikut capaian Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung pada Triwulan II Tahun 2024 :

Grafik 2. 5 Capaian Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024



Sumber : BPS Tahun 2024

Capaian NTP Provinsi Lampung pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 128,94 lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian NTP Nasional yaitu sebesar 119,61 atau naik 1,88 persen dibanding NTP bulan sebelumnya, Peningkatan NTP pada Juli 2024 disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani dan turunnya indeks harga yang dibayar petani. Penurunan indeks yang dibayar petani disebabkan oleh turunnya indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,53 persen dan naiknya indeks biaya produksi serta penambahan barang modal sebesar 0,03 persen.

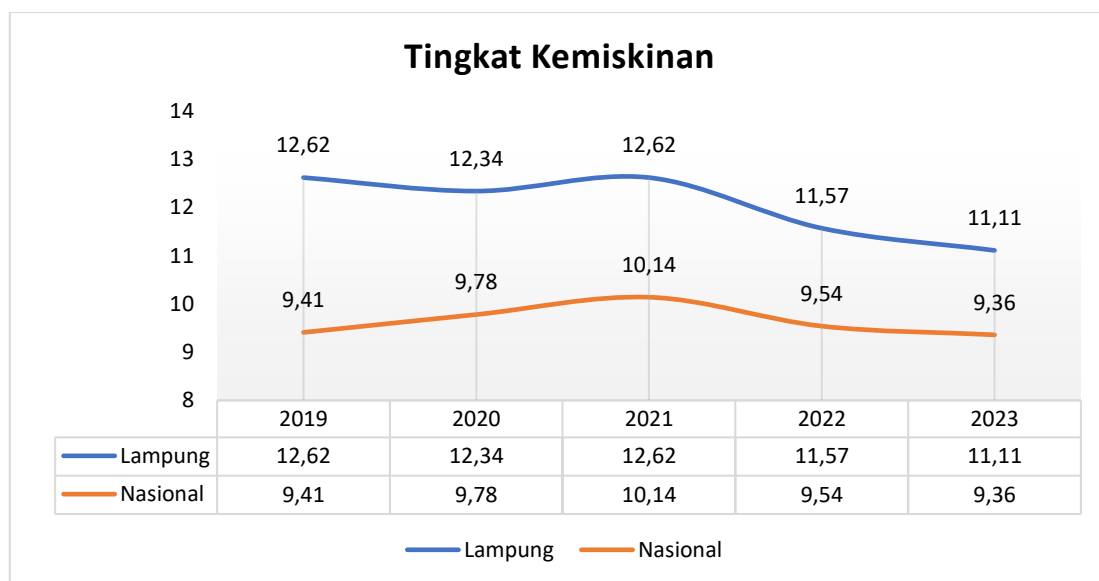
Selain itu, peningkatan NTP Juli 2024 dipengaruhi oleh naiknya NTP di beberapa subsektor pertanian yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 1,02 persen dan subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 4,06 persen. Sementara itu, NTP yang mengalami penurunan yaitu subsektor tanaman hortikultura sebesar 6,72 persen, subsektor peternakan sebesar 0,41 persen, subsektor perikanan tangkap sebesar 0,31 persen, dan subsektor perikanan budidaya 0,12 persen.

5. Berdasarkan metode penghitungannya, bahwa tingkat kemiskinan menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk

memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan).

Capaian Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2024 semester 1 belum rilis, sehingga menggunakan capaian Tahun 2023, berikut capaian Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2023 :

Grafik 2. 6 Capaian Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2023



Sumber : BPS Tahun 2024

Capaian Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung pada Tahun 2023 sebesar 11,11%. Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 12,62 persen di tahun 2019 menjadi 11,11 persen di Tahun 2023, namun angka kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas persentase penduduk miskin nasional yang berada pada angka 9,36% persen. Bila dibandingkan dengan September 2022, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 995,59 ribu menjadi 970,67 ribu dan Jumlah penduduk miskin turun 31,74 ribu orang terhadap Maret 2022 sebesar 1002,41 ribu orang.

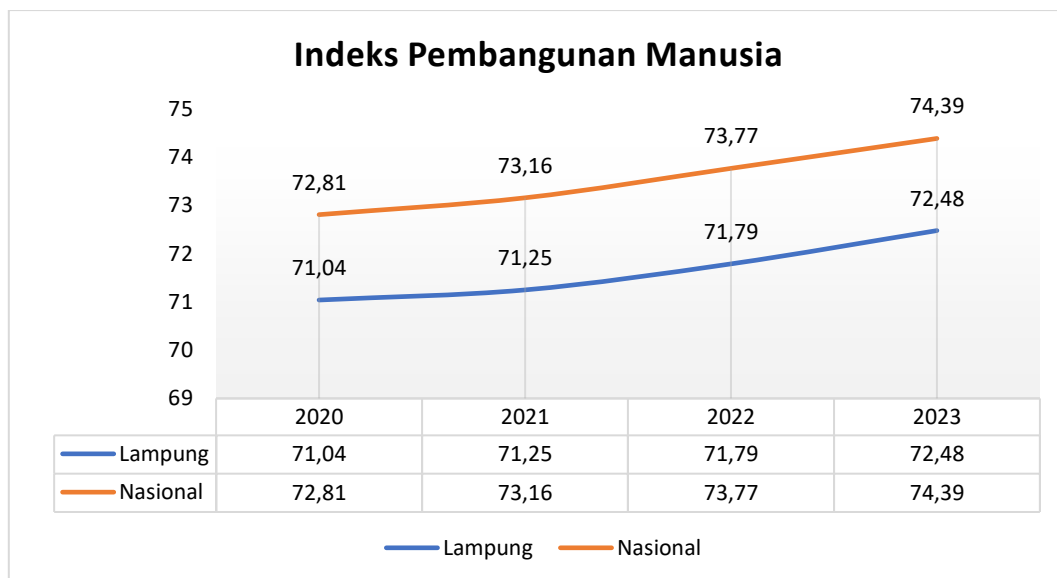
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu aspek umur panjang dan hidup sehat (*long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama

Sekolah (HLS). Kemudian, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Selain itu dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam penyusunan IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Hal tersebut menunjukkan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024 belum rilis , sehingga menggunakan capaian Tahun 2023. Berikut capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2023 :

**Grafik 2. 7 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (SP2020) Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2023**



Sumber : BPS Tahun 2024

Capaian nilai IPM Provinsi Lampung menggunakan metode baru meningkat dari 71,04 pada tahun 2020 menjadi 72,48 pada tahun 2022, capaian tersebut masih dibawah capaian nasional pada Tahun 2023 yaitu sebesar 74,39. IPM Lampung tumbuh sebesar 1,44 persen dibandingkan tahun 2020 dan IPM Provinsi Lampung masuk dalam kategori “TINGGI” dengan nilai IPM 72,48.

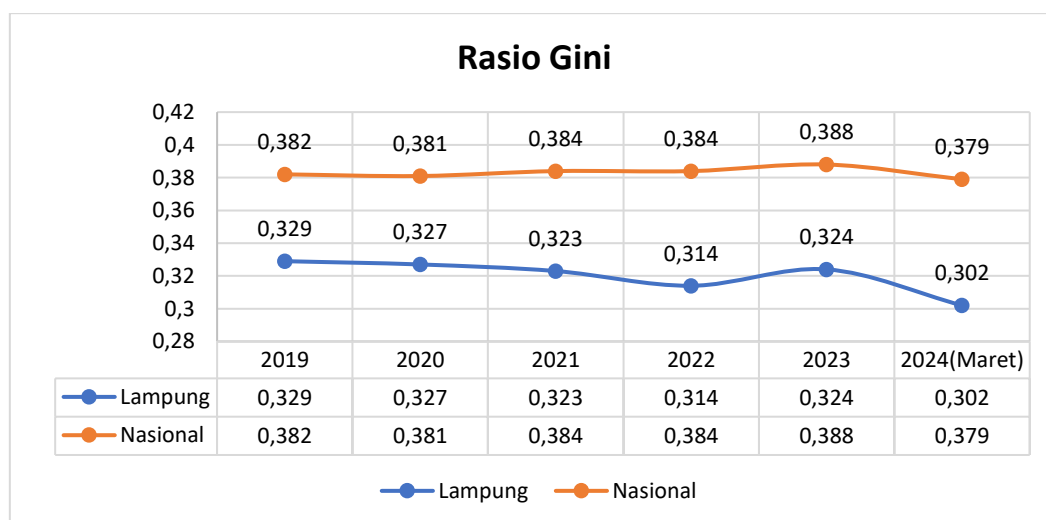
7. Rasio Gini adalah alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada Kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya



pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Rasio Gini (*Gini Ratio*) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Rasio Gini umum digunakan untuk mengukur pemerataan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah baik pada skala negara, provinsi maupun kabupaten/kota. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0 – 1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati angka nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati angka satu.

Berikut capaian Indeks Gini Provinsi Lampung Tahun 2024 :

**Grafik 2.8 Capaian Indeks Gini Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2023**



Sumber : BPS Tahun 2024

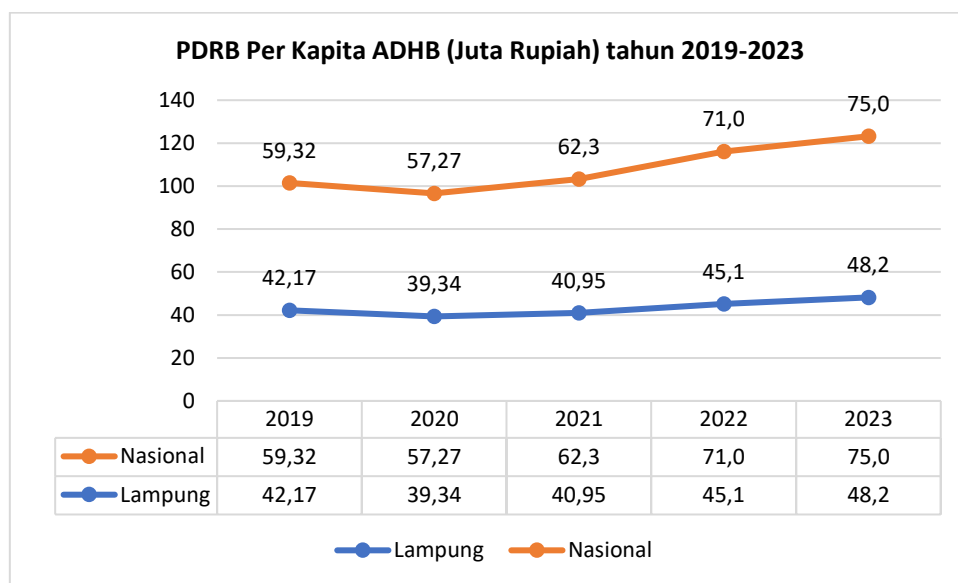
Capaian Rasio Gini Provinsi Lampung Pada periode tahun 2019 hingga 2024, Rasio Gini Provinsi Lampung menunjukkan tren yang menurun dari 0,329 Tahun 2019 menjadi 0,302 pada Tahun 2024, dan berada dibawah rata-rata Nasional (0,379). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung masih cukup rendah.

8. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan per kapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula

tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun.

Capaian PDRB Per Kapita ADHB tahun 2024 belum rilis , sehingga menggunakan capaian Tahun 2023. Berikut capaian PDRB Perkapita Provinsi Lampung pada Tahun 2023 :

Grafik 2. 8 Capaian PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS Tahun 2024

Pada tahun 2023, PDRB per kapita Lampung ADHB mencapai 48,2 juta rupiah, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 45,1 juta rupiah.

- Jalan merupakan salah satu indikator penting yang harus di ukur setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR. Pengelolaan jaringan jalan dan jembatan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung berpedoman kepada asas desentralisasi (pengelolaan jalan dan jembatan provinsi) dan asas dekonsentrasi (pengelolaan jalan dan jembatan nasional). Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Lampung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/234.a/III.09/HK/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi memiliki kewajiban dalam hal penyelenggaraan dan penanganan ruas jalan provinsi sebesar 1,693.273 Km (99 Ruas) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Grafik 2. 9 Capaian Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2023

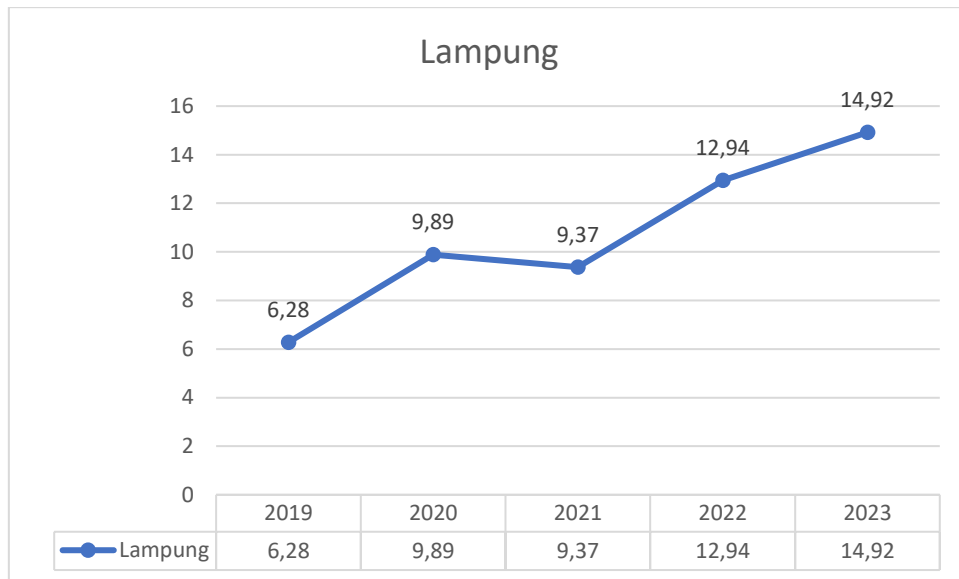


Sumber : BPS Tahun 2024

Data menunjukkan capaian kemantapan jalan Provinsi Lampung sesuai hasil survey kondisi jalan pada Bulan Desember 2023. Hal ini dikarenakan survey kemantapan jalan dilakukan dua kali pada pertengahan dan akhir tahun, sehingga pengukuran realisasi capaian adalah berdasarkan hasil survey kemantapan jalan Bulan Desember Tahun 2023 yang berada di angka 78,67% meningkat sebesar 1,82% dibandingkan dengan tahun 2022 yang berada di angka 76,85%.

10. Dalam rangka memberikan informasi tentang pencapaian target dari komitmen NDC, juga sebagai kontrol terhadap progress capaian NDC, serta sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden No 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (GRK), Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan inventarisasi GRK Nasional, serta Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV), dengan mengacu pada Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines Tahun 2006. Penghitungan emisi dilakukan terhadap 4 (empat) kategori sumber emisi atau sektor, yaitu energi, proses industri dan penggunaan produk, pertanian dan kehutanan serta perubahan penggunaan lahan lainnya, serta pengelolaan limbah.

Grafik 2. 10 Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2023



Sumber : Hasil Perhitungan PEP Bappenas 2024,diolah

Capaian penurunan emisi GRK provinsi Lampung selalu melampaui target Penurunan Emisi GRK yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024.

Tingkat Capaian indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca jika dibandingkan dengan target di Tahun 2023 yaitu 7,066% mendapat capaian 211,15% dengan predikat kinerja kategori sangat tinggi.

#### 11. Presentase Peningkatan PAD

Pada Tahun 2023 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar 2,75 % dibandingkan Tahun 2022, hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor yaitu menurunnya penjualan kendaraan bermotor secara nasional, musim kemarau Elnino yang cukup lama pada Tahun Anggaran 2023 yang mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya daya beli masyarakat, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi adalah kenaikan harga BBM dan tidak ada program stimulus industri otomotif di Tahun Anggaran 2023.

Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024 terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2023 adalah 1,80%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2024 adalah Rp. 1.763.489.742.673,36.

## 2.4 Kinerja RKPD Provinsi Lampung Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Sesuai dengan Pasal 346 ayat 3 Permendagri 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, disebutkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan RKPD dilaksanakan setiap Triwulan. Berkenaan dengan hal tersebut, pada bagian ini disampaikan evaluasi hasil RKPD Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, berdasarkan pengumpulan data inputan manual Evaluasi Renja Perangkat Daerah ke Bappeda Provinsi Lampung. Dengan evaluasi ini nantinya akan diketahui capaian realisasi fisik dan keuangan dari masing masing Perangkat Daerah (PD) selama Triwulan II Tahun 2024.

Tabel 2. 4 Realisasi Fisik Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Tingkat Capaian
1	Inspektorat Provinsi Lampung	15,42%
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18,75%
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	22,33%
4	Badan Pendapatan Daerah	44,82%
5	Badan Kepegawaian Daerah	39,34%
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	41,56%
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	7,12%
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	24,49%
9	Badan Penghubung	30,66%
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26,29%
11	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	47,68%
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8,74%
13	Dinas Kesehatan	26,34%
14	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	36,35%
15	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	13,42%
16	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	18,39%
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	12,78%
18	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	5,22%
19	Dinas Perkebunan	29,39%

No	Perangkat Daerah	Tingkat Capaian
20	Dinas Sosial	48,92%
21	Dinas Tenaga Kerja	24,48%
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19,40%
23	Dinas Lingkungan Hidup	0,00
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8,15%
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	38%
26	Dinas Perhubungan	27,06%
27	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	34,26%
28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	36%
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	36%
30	Dinas Pemuda dan Olahraga	17,90%
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	35,68%
32	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12,20%
33	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	44,39%
34	Dinas Kehutanan	21,82%
35	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	21,11%
36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17,70%
37	Rumah Sakit Abdul Moeloek	
38	Rumah Sakit Jiwa Daerah	28,00%
39	Satuan Polisi Pamong Praja	29,06%
40	Biro Administrasi Pembangunan	26,19%
41	Biro Perekonomian	32,00%
42	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	10,00%
43	Biro Hukum	9,92%
44	Biro Kesejahteraan Rakyat	30,33%
45	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	18,75%
46	Biro Umum	44,22%
47	Biro Organisasi	33,56%
48	Biro Administrasi Pimpinan	33,84%

Sumber : Aplikasi Simonev Bappeda Provinsi Lampung 2024, diolah

Berdasarkan data tabel 2.4 diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian fisik Perangkat Daerah pada Triwulan II tahun 2024 adalah 25,70%.

**Tabel 2.5 Realisasi Keuangan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Capaian</b>
1	Inspektorat Provinsi Lampung	11,35%
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8,29%
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15,26%
4	Badan Pendapatan Daerah	25,03%
5	Badan Kepegawaian Daerah	23,90%
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	21,82%
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	20,63%
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	16,13%
9	Badan Penghubung	19,93%
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28,80%
11	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	43,23%
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11,50%
13	Dinas Kesehatan	22,40%
14	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	13,97%
15	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	17,23%
16	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan	26,60%
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	13,33%
18	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	15,63%
19	Dinas Perkebunan	10,68%
20	Dinas Sosial	34,23%
21	Dinas Tenaga Kerja	14,42%
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23,26%
23	Dinas Lingkungan Hidup	1,08%
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8,67%
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	23%
26	Dinas Perhubungan	26,63%

No	Perangkat Daerah	Tingkat Capaian
27	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	14,66%
28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	27%
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23%
30	Dinas Pemuda dan Olahraga	20,29%
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	24,82%
32	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	8,67%
33	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	17,32%
34	Dinas Kehutanan	18,10%
35	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	24,18%
36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21,31%
37	Rumah Sakit Abdul Moeloek	
38	Rumah Sakit Jiwa Daerah	17,52%
39	Satuan Polisi Pamong Praja	23,56%
40	Biro Administrasi Pembangunan	11,22%
41	Biro Perekonomian	19,43%
42	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	27,24%
43	Biro Hukum	15,52%
44	Biro Kesejahteraan Rakyat	27,02%
45	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	15,98%
46	Biro Umum	48,55%
47	Biro Organisasi	45,42%
48	Biro Administrasi Pimpinan	33,70%

Sumber : Aplikasi Simonev Bappeda Provinsi Lampung 2024, diolah

Berdasarkan data tabel 2.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian keuangan Perangkat Daerah pada Triwulan II Tahun 2024 adalah 20,90%.



Tabel 2. 5 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan / Bidang / Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024		Realisasi Triwulan II Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (%)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1,01	PENDIDIKAN																	
1.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	5.736.263.094.336	100	4.216.390.053.279	100	1.260.767.369.613	8,14%	401.437.677.622	8,34%	10,21%	8,34%	4.557.394.191.164	77,08%	79,45%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SMA, SMK dan SLB yang berakreditasi Minimal B	%	75	2.626.320.513.344	71	1.692.098.545.682	75	760.124.102.000	71	1.843.670.922	94,67%	4,61%	71	1.693.942.216.604	94,67%	64,50%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Jumlah Guru Honor Murni yang Menerima Insentif Jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus	%	42,89	47.479.476.400	39	40.283.535.800	42,89	6.260.000.000	39	1.966.475.200	90,93%	31%	39	42.250.011.000	90,93%	88,99%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1,02	KESEHATAN																	
1.02.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	315.243.175.784,87	100	224.056.631.038,98	100	98.648.201.637,86	30	27.652.024.127	30%	28,03%	130	251.708.655.166	130%	79,85%	Dinas Kesehatan

1.02.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tepat waktu	%															Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
1.02.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	49.115.133.727	100	46.906.567.182	100	47.059.784.993	40,54	12.490.341.478	40,54	26,54	40,54	65.338.047.047	40,54	133,03	Rumah Sakit Jiwa
1.02.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase labkesda terakreditasi	%	100	996.112.093.507	100	642.518.241.913	100	204.551.434.359	50	47.675.429.760	50%	23,31 %	150	690.193.671.673	150%	69,29%	Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana pada situasi KLB	%	100		100		100		42,17		42,17 %		142,17		142,17 %		Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	%	100		100		100		89,11		89,11 %		189,11		189,11 %		Dinas Kesehatan
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	91		93,11		91		30,15		33,13 %		123,26		135,45 %		Dinas Kesehatan
		Prevalensi wasting	%	4		7		4,51		2,68		142,30 %		9,68		242%		Dinas Kesehatan
		Persentase penemuan kasus (CDR) TBC	%	79		55,5		79		25		31,65 %		80,5		101,90 %		Dinas Kesehatan
		Persentase FKTP terakreditasi	%	85		86		85		98,53		115,92 %		184,53		217,09 %		Dinas Kesehatan

		Persentase rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi	%	100		100		100		91		91%		191		191%		Dinas Kesehatan
1.02.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tersedianya penambahan gedung rumah sakit	%															Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
1.02.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	7.695.312.500	83,77	446.198.578	100	2.596.594.729	6,47	18.834.780	6,47	0,73	6,47	465.033.358	6,47	6,04	Rumah Sakit Jiwa
1.02.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%															Dinas Kesehatan
1.02.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	tersedianya SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	47	48.435.461.946	37,81	29.039.092.220	47	1.756.236.000	40,31	256.620.040	85,77 %	14,61 %	78,12	29.295.712.260	166,21 %	60,48%	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
1.02.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	100	610.000.000	100	251.106.326	100	471.412.400	0,00	0	0,00	0,00	0	251.106.326	0,00	41,16	Rumah Sakit Jiwa
1.02.4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pemenuhan sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman	%	100	801.000.000	96	252.923.520	100	220.000.000	50	102.025.000	50%	46,38 %	146	354.948.520	146%	44,31%	Dinas Kesehatan
1.02.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kab/kota yang menerapkan kebijakan germas	%	75	2.092.131.491	100	1.365.547.800	75	700.000.000	40	104.401.420	53,33 %	14,91 %	140	1.469.949.220	186,67 %	70,26%	Dinas Kesehatan

1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
1.03.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	68.085.353.700	100	103.207.495.548	100	57.599.687.365	34,41	18.870.125.984	34,41	32,76	34,41	122.077.621.532	34,41	179,30	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.03.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Yang Tertib dan Tepat Waktu	%	100	258.705.149.808	100	104.105.714.166	100	53.573.629.766	5,085714286	22.463.383.957,0	5,09%	41,93%	100	126.569.098.123		48,92%	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi dan infrastruktur SDA lainnya yang terlayani pada wilayah kewenangan provinsi	%	100	350.279.000.394	100	133.002.729.137	100	168.188.550.010	35,405	14.168.053.972,2	35,41%	8,42%	100	146.076.949.871	18,93%	97,35%	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.03.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase kesesuaian realisasi dengan dokumen perencanaan sesuai dengan aturan yang ada	%	100	15.415.362.000	100	12.206.230.260	100	2.652.805.200	0	125.627.000	0,00%	4,74%	0,00%	12.206.230.260	0,00%	79,18%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.03.4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	MENINGKATKAN KESESUAIAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PERSAMPAHAN REGIONAL	%	100	1.873.340.000	100	1.515.389.620	100	1.749.136.940	0	51.196.800	0,00%	2,93%	0,00%	1.515.389.620	0,00%	80,89%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

1.03.5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penanganan cakupan rumah tangga bersanitasi layak	%	100	5.680.446.000	100	2.687.037.610	100	2.552.739.200	0	196.978.600	0,00%	7,72%	0,00%	2.687.037.610	0,00%	47,30%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.03.8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase kualitas bangunan gedung provinsi dan lingkungannya yang sesuai standar	%	100	324.785.215.341,00		172.884.024.397,00	100	106.732.529.661,00	0	34.377.420.979,00	0,00%	32,21%	0,00%	207.261.445.376,00	0,00%	63,81%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.03.9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase penataan bangunan dan lingkungannya	%	100	42.212.887.300,00	100	32.269.546.474,00	100	6.547.667.327,00	0	26.526.900,00	0,00%	0,41%	0,00%	2.408.044.484,00	0,00%	5,70%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	%	78,00	925.197.681.601	78,67	1.441.287.787.194	78,67	798.348.509.874	40,00	167.557.078.502	50,85	20,99	50,85	1.608.844.865.696	65,19	173,89	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM yang Mendapatkan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	%	100	2.100.000.000	100	6.248.508.488	100	4.462.593.000	50,05	1.137.940.000	50,05	25,50	50,05	7.386.448.488	50,05	351,74	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	%	100	15.759.206.618,00	100	9.318.686.490	100	7.670.000.000	0	1.734.227.430	0,00%	22,61%	0,00%	11.126.798.470	0,00%	70,61%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1,04	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	

1.04.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	66.076.187.499	100	20.590.893.946,00	100	21.154.920.216,55	100	7.136.421.206,00	0,00%	0,33%	100	27.789.781.481	1,39%	42,06%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.04.3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penyediaan rumah layak huni	%	100	61.910.731.800	98,62	33.418.030.472	100	19.200.000.000	0	3.123.190.900	0,00%	2,61%	0,00%	27.637.828.272	0,00%	44,64%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.04.5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU dibangun dikawasan permukiman sesuai kebutuhan	%	100	252.158.127.714	100	169.614.512.111	100	174.146.818.660	0	70.807.790.399	0,00%	40,66%	0,00%	240.422.302.510	0,00%	95,35%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1.05	<b>KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>																	
1.05.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persen	100	211.090.892.099	100	82.166.701.067	100	43.872.972.327	50	20.256.704.461	50%	46%	150	102.423.405.528	150%	49%	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	54.486.898.911	100	41.595.364.062	100	9.412.253.321	31%	3.895.770.815	31%	41,39%	83%	45.491.134.877	83,49%	83,49%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	100	21.833.928.600	100	8.670.402.084	100	4.909.790.700	40	15.300.000	40%	0%	140	8.685.702.084			Satuan Polisi Pamong Praja

1.05.3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase peningkatan upaya penanggulangan bencana yang mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Persen	100	65.513.254.766	100	35.150.569.289	100	14.779.227.550	13%	10.154.557.385	13%	68,71 %	69%	45.305.126.674	69,15 %	69,15%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>1.06</b>	<b>SOSIAL</b>																	
1.06.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	121.398.507.854	100	23.591.171.605	100	22.949.477.672	29%	9.672.639.611	29%	42,15 %	100	33.263.811.216	100,29 %	27,40%	Dinas Sosial
1.06.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pembiayaan Program Pemberdayaan Sosial	%	100	2.583.716.900	100	525.845.850	100	351.896.850	44%	113.554.600	44%	32,27 %	100	639.400.450	100,44 %	24,75%	Dinas Sosial
1.06.3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan	%	100	1.000.200.000	100	215.575.280	100	249.999.500	53%	150.394.000	53%	60,16 %	101	365.969.280	100,53 %	36,59%	Dinas Sosial
1.06.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	%	100	42.745.076.359	100	13.258.987.560	100	7.837.448.908	54%	2.513.366.237	54%	32,07 %	101	15.772.353.797	100,54 %	36,90%	Dinas Sosial
1.06.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	1.883.591.500	100	3.790.281.165	100	1.053.153.000	33%	735.031.000	33%	69,79 %	100	4.525.312.165	100,33 %	240,25 %	Dinas Sosial

1.06.6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	3.732.164.008	100	2.578.958.168	100	1.267.505.677	49%	508.581.600	49%	40,12 %	100	3.087.539.768	100,49 %	82,73%	Dinas Sosial
1.06.7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Provinsi	%	100	938.358.500	100	925.185.423	100	294.171.000	25%	108.666.000	25%	36,94 %	100	1.033.851.423	100,25 %	110,18 %	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.07	TENAGA KERJA																	
2.07.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	115.154.889.612	100	53.416.362.926	100%	28.040.685.048	41,26%	11.099.763.392	41,26 %	39,58 %	41,26%	64.516.126.318	41,26 %	56,03%	Dinas Tenaga Kerja
2.07.2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja	%	100%	712.000.000	84	297.683.597	84	135.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	297.683.597	0,00%	41,81%	Dinas Tenaga Kerja
2.07.3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Bersertifikat	%	100%	15.998.125.000	100	5.221.928.416	100%	1.504.800.000	6,67%	24.955.200	6,67%	1,66%	6,67%	5.246.883.616	6,67%	32,80%	Dinas Tenaga Kerja
2.07.4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	%	100%	2.650.465.600	100	1.364.237.350	70%	899.800.000	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	1.364.237.350	0,00%	51,47%	Dinas Tenaga Kerja
2.07.5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	%	100%	3.242.000.000	100	1.542.037.640	100%	2.188.519.950	8,33%	112.392.700	8,33%	5,14%	8,33%	1.577.667.840	8,33%	48,66%	Dinas Tenaga Kerja



2.07.6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAN	Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Norma Kerja Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Perusahaan	%	100%	3.325.000.000	100	530.938.920	100%	800.000.000	10,67%	76.762.500	10,67%	9,60%	10,67%	586.521.420	10,67%	17,64%	Dinas Tenaga Kerja
2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
2.08.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	%	100	49.022.576.250	100	23.252.580.820	100	11.821.679.243	29,49	4.584.854.898	29,49	38,78	29,49	27.837.435.718,00	29,49	56,78	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Advokasi Pengarusutamaan Gender	%	100	2.094.345.000	100	1.799.718.455	100	648.098.000	26,68	257.176.850	26,68	39,68	26,68	2.056.895.305,00	26,68	98,21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Oleh UPTD PPA	%	100	4.488.530.000	100	2.355.435.266	100	879.980.000	23,33	340.611.200	23,33	38,71	23,33	2.696.046.466,00	23,33	60,07	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera	%	100	2.199.934.400	100	1.058.766.779	100	140.852.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.058.766.779,00	0,00	48,13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.085	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Ketersediaan Data yang Up to Date di Kabupaten/Kota di Lampung	%	100	1.957.093.200	100	765.420.600	100	175.850.000	0,00	14.018.500	0,00	7,97	0,00	779.439.100,00	0,00	39,83	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.086	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	100	2.594.532.000	100	1.689.822.260	100	472.200.000	0,00	135.145.300	0,00	28,62	0,00	1.824.967.560,00	0,00	70,34	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.087	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan oleh UPTD PPA	%	100	701.098.000	100	533.413.400	100	191.520.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	533.413.400,00	0,00	76,08	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>2,09</b>	<b>PANGAN</b>																	
2.092	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase terkelolanya Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.	Persentase	100	1.322.508.000	80	364.815.610	100	155.000.000	-	-	-	-	80	364.815.610	80,00	27,59	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.093	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.	Persentase	100	9.474.600.000	80	7.399.776.058	100	1.398.494.000	9	16.300.000	9,00	1,17	89	7.416.076.058	89,00	78,27	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

2.094	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan penanganan kerawanan pangan.	Persen	100	949.200.000	80	692.257.000	100	300.000.000	-	-	-	-	80	692.257.000	80,00	72,93	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.095	PROGRAM PENGAWASAN KEMAMANAN PANGAN	Persentase tingkat pengawasan keamanan pangan segar yang diuji.	Persen	100	3.938.927.400	80	2.598.079.381	100	1.076.461.000	5	76.535.000	5,00	7,11	85	2.674.614.381	85,00	67,90	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
<b>2,10</b>	<b>PERTANAHAN</b>																	
2.106	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	persentase kesesuaian retribusi tanah dan ganti kerugian sesuai dengan aturan	%	100	2.704.206.618	100	591.438.200	100	857.709.500	0	23.989.000	0,00%	2,80%	0,00%	615.427.200	0,00%	22,76%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Pemanfaatan Aset Tanah PEMDA	%	100	2.761.542.280	100	1.036.619.738	100	1.472.290.500	0	142.892.400	0,00%	9,71%	0,00%	1.036.619.738	0,00%	37,54%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
<b>2,11</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>																	
2.11.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	67.663.790.827,4	100	29.212.739.912	100	15.791.287.874,0 0	0	3.373.972.059	0,00	21,37	100	32.586.711.971	100,00	48,16	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup kabupaten/kota yang terverifikasi dan tervalidasi (%)	%	100	2.115.823.000	100	1.903.408.117	100	230.408.700	0	0	0,00	0,00	100	1.903.408.117	100,00	89,96	Dinas Lingkungan Hidup

2.11.3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	%	100	14.526.163.000	100	645.457.546	100	409.708.000	0	0	0,00	0,00	100	645.457.546	100,00	4,44	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	%	100	200.000.000	100	296.932.880	100	300.000.000	0	0	0,00	0,00	100	296.932.880	100,00	148,47	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Capaian Kinerja Limbah B3	%	100	1.417.251.900	100	326.961.800	100	188.518.000	0	0	0,00	0,00	100	326.961.800	100,00	23,07	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	100	1.828.393.400	83,33	227.975.900	100	1.644.822.000	0	0	0,00	0,00	83	227.975.900	83,33	12,47	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	%	100	180.000.000	100	63.908.000	100	66.524.000	0	0	0,00	0,00	100	63.908.000	100,00	35,50	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	%	100	880.418.000	90,48	114.197.500	100	65.519.000	0	0	0,00	0,00	90	114.197.500	90,48	12,97	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%	100	548.125.600	100	55.555.000	100	130.000.000	0	0	0,00	0,00	100	55.555.000	100,00	10,14	Dinas Lingkungan Hidup

2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	%	100	4.529.322.800	100	3.083.679.536	100	700.614.000	0	0	0,00	0,00	100	3.083.679.536	100,00	68,08	Dinas Lingkungan Hidup
2,12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
2.12.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	36.954.102.363	84,81	21.622.490.529	100	7.231.985.249	11,33%	2.459.749.934	11,33 %	34,01 %	3,75	24.082.240.463	3,75%	65,17%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase pelaksanaan pendaftaran penduduk di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	%	100	638.071.000	100	481.787.177	100	515.000.000	0,00%	167.354.000	0,00%	32,50 %	0,00%	649.141.177	0,00%	101,73 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	%	100	806.447.000	100	307.725.100	100	157.556.000	6,67%	17.610.000	8,89%	11,18 %	8,89%	325.335.100	8,89%	40,34%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	%	100	949.552.000	100	405.651.054	100	159.261.000	0	0	0,00%	0,00%		405.651.054	0,00%	42,72%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Provinsi Lampung	%	100	526.060.232	100	247.918.400	100	131.426.000	0	0	0,00%	0,00%		247.918.400	0,00%	47,13%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2,13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	

2.13.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	persen	100	22.902.531.181	100,00	65,35	100	5.546.478.149	42	4.687.148.654	30,00	30,00	42	4.687.148.654	42,00	20,47	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
2.13.3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kerjasama antar desa yang dilaksanakan	Angka	25	240.000.000	100,00	58,33	25	170.560.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
2.13.4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan pelayanan administrasi menggunakan Smart Village	Persen	25	1.200.000.000	100,00	183,33	25	1.877.883.100	14	256.226.100	54,58	13,64	14	256.226.100	56,00	21,35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
2.13.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	Persen	25	3.047.789.500	100,00	57,91	25	2.442.316.900	10	300.521.000	40,00	12,30	10	300.521.000	40,00	9,86	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
2,14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
2.14.2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kebutuhan KB yang belum terpenuhi (Unmet Need)	%	100	318.652.000	100	150.965.900	100	59.800.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	150.965.900,00	0,00	47,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.14.3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Keluarga Berencana	%	100	481.302.000	100	211.000.800	100	73.470.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	211.000.800,00	0,00	43,84	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	%	100	1.986.086.000	100	1.580.517.700	100	179.200.000	0,00	55.589.000	0,00	31,02	0,00	1.636.106.700,00	0,00	82,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>2,15</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>																	
2.15.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tata kelola program penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	19.271.450.000	16,03	16.728.072.535	100	17.260.315.687,35	32,63	7.600.930.848	32,63	44,04	32,63	24.329.003.383	32,63	126,24	Dinas Perhubungan
2.15.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	%	100	13.656.592.525	38,03	5.113.692.041	100	3.050.000.000	22,34	714.913.247	22,34	23,44	22	5.828.605.288	22,34	42,68	Dinas Perhubungan
2.15.3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pengelolaan pelayaran	%	100	675.000.000	68,83	330.975.650	100	425.000.000,00	0,00	6.013.800	0	1,42	0	336.989.450	0,00	50	Dinas Perhubungan
2.15.5	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase pengelolaan perkeretaapian	%	100	50.000.000	100	27.254.300	100	30.000.000	0,00	0	0	0,00	0	27.254.300	0,00	55	Dinas Perhubungan
<b>2,16</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>																	
2.16.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	70.203.282.890	100	51.924.236.141	100	16.712.280.206	39,01%	6.513.944.181	41,01%	38,98%	71,13%	58.438.180.322	71,08%	83,24%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

2.16.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Pemerintah Provinsi Lampung	%	100	48.112.207.570	100	62.053.840.128	100	10.693.424.000	13,64%	1.918.925.516	35,19 %	17,94 %	58,75%	63.972.765.644	74,59 %	132,97 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Informatika Provinsi Lampung	%	100	47.556.316.401	100	34.794.044.352	100	12.118.039.000	50,00%	4.280.589.364	52,42 %	35,32 %	87,12%	39.074.633.716	85,61 %	82,16%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2,17	<b>KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>																	
2.17.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	persen	100	52.596.427.633,00	75	36.372.001.488,00	100	12.532.662.623,62	50,00	4.938.744.409	50,00	39,41	75	41.310.745.897	75,00	78,54	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persen	46,70	2.902.460.000	37,79	1.844.812.950	46,70	365.988.000	37,79	25.260.000	80,92	6,90	37,79	1.870.072.950	80,92	64,43	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



2.17.3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persen	47,17	775.599.000	36,96	590.267.907	47,17	188.528.000	36,96	59.987.000	78,35	31,82	36,96	650.254.907	78,35	83,84	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Sehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persen	78,57	533.039.000	61,63	411.732.217	78,57	175.000.000	61,63	-	78,44	-	61,63	411.732.217	78,44	77,24	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persen	26,55	10.491.660.000	31,01	9.738.769.250	26,55	5.191.677.000	12,40	-	46,70	-	31,01	9.738.769.250	116,80	92,82	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

2.17.6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persen	23,58	1.519.336.000	14,23	1.626.569.800	23,58	318.866.000	11,04	40.000.000	46,82	12,54	14,23	1.666.569.800	60,35	109,69	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	persen	0,50	4.912.835.000	0,48	5.694.559.588	0,50	1.014.955.000	0,28	447.130.440	56,00	44,05	0,48	6.141.690.028	96,00	125,01	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	persen	10,91	1.565.503.000	7,09	2.079.896.800	10,91	575.000.000	7,09	57.600.000	64,99	10,02	7,09	2.137.496.800	64,99	136,54	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
<b>2,18</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>																	
2.18.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan asset, serta dokumen perencanaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase	100	90.786.217.259	100	51.347.670.318	100	16.729.133.419	7	7.510.377.881	7	45	77	58.858.048.199	76,75	65	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18.2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase dokumen perencanaan penanaman modal, deregulasi penanaman modal dan pengolahan data serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal	Dokumen	100	1.125.000.000	100	1.056.185.450	100	620.000.000	0	132.872.000	-	21	100	1.189.057.450	75	106	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peringkat Tujuan Investasi Nasional	Peringkat	7	3.750.000.000	24	1.534.985.249	25	200.000.000		75.302.000	-	38	24	1.610.287.249	34	43	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian izin berusaha sesuai dengan ketentuan berlaku	Pelaku Usaha	100	4.720.000.000	100	1.783.850.725	100	500.000.000	100	139.546.500	100	28	200	1.923.397.225	77,5	41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.5	PROGRAM PENGALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi terhadap Target Nasional	Persentase	100	2.500.000.000	99	1.951.430.000	100	1.077.200.000		168.378.000	-	16	99	2.119.808.000	99	85	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18.6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang akurat	Dokumen	100	800.000.000	100	343.219.000	100	100.000.000	0	3.000.000	-	3	100	346.219.000	0	43	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>2,19</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>																	
2.19.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tepat waktu	%	100	185.848.301.709,00	100	69.822.631.323,00	100	83.391.340.769,55	6,27%	26.925.136.709,00	6,27%	8,73%	57,19%	96.747.768.032,00	57,19%	108,29%	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	%	100	12.172.685.400,00	100	20.487.319.374,50	100	14.309.608.000,00	32,17%	658.045.300,00	32,17%	28,61%	90,00%	21.145.364.674,50	90,00%	203,28%	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	%	100	85.864.356.000,00	100	76.729.394.492,00	100	37.599.687.000,00	25,69%	1.811.623.100,00	25,69%	30,07%	73,81%	78.541.017.592,00	73,81%	74,97%	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang ditingkatkan	%	100	373.423.000,00	100	2.292.695.339,00	100	208.385.000,00	100,00%	205.487.000,00	100,00%	98,61%	75,00%	2.498.182.339,00	75,00%	669,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>2,20</b>	<b>STATISTIK</b>																	
2.20.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Statistik Sektoral dilingkup Provinsi Lampung	%	100	872.700.700	100	552.238.308	100	283.940.000	0,00%	0	0,00%	0,00%	51,35%	552.238.308	29,17%	63,28%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
<b>2,21</b>	<b>PERSANDIAN</b>																	

2.21.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik yang Telah Menerapkan Prinsip Manajemen Keamanan Informasi	%	100	1.447.121.500	100	645.264.967	100	253.839.000	0,00%	0	0,00%	0,00%	64,06%	645.264.967	65,63 %	44,59%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.22	<b>KEBUDAYAAN</b>																	
2.22.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Seni dan Apresiasi Seni yang mengikuti kegiatan pengembangan kesenian budaya	%	80	8.275.998.000	64	6.089.481.190	80	2.500.000.000	64	903.422.450	80%	36,14 %	64	6.992.903.640	80%	84,50%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase warisan budaya tak benda yang dilemkan (dokumenter)	%	85,19	4.516.608.000	59,26	3.148.523.748	85,19	1.450.000.000	59,26	44.055.750	69,56 %	3,04%	64	3.192.579.498	75%	70,69%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Warisan Seni Dan Budaya Yang Tersertifikasi Nasional	%	80	1.020.321.600	80	959.517.085	80	479.200.000	0	50.939.060	175,79 %	20,26 %	80	1.010.456.145	100%	99,03%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang teregistrasi nasional	%	91,02	1.380.200.000	80	622.506.294	91,02	500.000.000	80	24.072.000	87,89 %	4,81%	80	646.578.294	87,89 %	46,85%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Jumlah Koleksi Cagar Budaya Museum yang dirawat	%	54,69	11.953.374.000	44,17	10.815.995.801	54,69	4.542.500.000	0	1.020.939.200	0,00%	22,48 %	44,17	11.836.935.001	81%	99,03%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23	<b>PERPUSTAKAAN</b>																	
2.23.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	%	100	15.000.492.000,0	98	13.076.660.690,0	100%	14.947.605.900,7	37%	6.309.232.735,0	37,29 %	42,21 %	98,78	19.385.893.425	98,78 %	129%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.23.2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase SDM Pengelola Perpustakaan dan Unit perpustakaan yang dibina	%	40	1.950.000.000	40	2.049.696.440,00	20%	1.125.732.000	0%	502.719.400,00	-	44,66 %	40,00	2.552.415.840	100%	131%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	jenis	10	275.000.000	10	227.517.700,00	10	202.515.000	1	40.579.200,00	10,00 %	20,04 %	11,00	268.096.900	110%	97%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>2,24</b>	<b>KEARSIPAN</b>																	
2.24.2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase dokumen arsip yang terpelihara	arsip	2.400	1.390.000.000	100	1.025.034.620,00	2000	931.036.000	50	147.506.500,00	2,50%	15,84 %	150,00	1.172.541.120	6%	84%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																	
<b>3,25</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>																	
3.25.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	94.071.239.000	100	38.503.541.619	100	20.928.316.779	40	8.121.967.726	40,00	38,81	40,00	46.625.509.345	40,00	49,56	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang (%)	%	100	6.225.279.000	100	2.857.334.217	100	1.736.332.000	35	109.348.456	35,00	6,30	135	2.966.682.673	135,00	47,66	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	ton	184185,72	42.303.877.000	188721,57	31.177.336.030	184185,72	11.573.917.000	110087,58	647.351.800	59,77	5,59	298809,15	31.824.687.830	162,23	75,23	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	ton	206995,13	26.125.000.000	154465,92	13.223.329.659	206995,13	4.536.450.000	102291,2	161.924.600	49,42	3,57	256757,12	13.385.254.259	124,04	51,24	Dinas Kelautan dan Perikanan

3.25.5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan	%	100	9.500.000.000	100	3.283.314.954	100	1.450.101.000	40	182.017.200	25,00	12,55	140	3.465.332.154	140,00	36,48	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume Ekspor Perikanan (ton)	ton	22797,91	12.805.000.000	14526,25	6.081.654.781	22797,91	1.792.719.000	6452,09	199.427.700	28,30	11,12	20978,34	6.281.082.481	92,02	49,05	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>3.26</b>	<b>PARIWISATA</b>																	
3.26.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	94,50%	13.138.132.773	100	35.911.692.605	100	14.387.773.424	36,23	5.212.750.990	36,23 %	70,02 %	36,23%	41.124.443.595	38,34 %	313,02 %	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
3.26.2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	%	95%	4.127.716.000	100	11.262.206.491	100	2.172.000.000	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00%	11.262.206.491	0,00%	272,84 %	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
3.26.3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan	%	95%	2.444.453.508	100	6.756.320.800	100	2.816.148.000	0,00	126.589.200	0,00%	4,50%	0,00%	6.882.910.000	0,00%	281,57 %	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
3.26.4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	%	95%	1.247.506.000	100	3.348.529.400	100	1.082.519.000	12,35	133.640.000	12,35 %	12,35 %	12,35%	3.482.169.400	13,00 %	279,13 %	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
3.26.5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	%	95%	766.621.716	83,56	9.872.376.500	100	1.977.900.000	23,81	470.925.396	23,81 %	23,81 %	23,81%	10.343.301.896	25,06 %	1349,21 %	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
<b>3.27</b>	<b>PERTANIAN</b>																	

3.27.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah provinsi.	Persentase	100	192.956.173.310	80	135.459.469.476	100	45.259.353.427	28	20.252.978.273	28,00	44,75	108	155.712.447.749	108,00	80,70	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	77.081.674.767	56	54.593.980.618	100	18.506.077.914,57	51,84	9.300.992.644	51,84	50,26	70,43	63.894.973.262	70,43	82,89	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	%	100	19.672.604.443	80	17.472.184.216	100%	16.634.581.538,02	50%	6.649.786.752,00	50,00 %	39,98 %	80,50	24.121.970.968	80,50 %	90,00%	Dinas Perkebunan
3.27.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan sarana pertanian	Persen	100	27.888.513.500	80	28.759.876.064	100	12.107.656.000	5	1.536.085.820	5,00	12,69	85	30.295.961.884	85,00	108,63	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Peredaran Benih Bermutu dan Sarana Pertanian Pertanian (%)	%	25	1.300.000.000	20	1.141.931.280	25	850.000.000,00	5	25.622.600,00	20,00 %	3,01%	25,00	1.167.553.880	100,00 %	89,81%	Dinas Perkebunan
3.27.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	%	100	41.505.645.873	69	28.666.623.740	100	10.141.674.500	35,71	904.618.554	35,71	8,92	80,15	29.571.242.294	80,15	71,25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.	Persen	100	80.651.459.100	80	74.540.633.648	100	30.528.715.000	4	9.128.693.161	4,00	29,90	84	83.669.326.809	84,00	103,74	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



3.27.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan (%)	%	3	10.720.000.000	2	9.725.005.124	3	6.103.500.000,00	0	81.997.600,00	0,00%	1,34%	2,00	9.807.002.724	66,67 %	91,48%	Dinas Perkebunan
3.27.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penataan Prasarana Peternakan Yang Sesuai Standar	%	100	16.857.214.000	65	7.070.393.019	100	923.483.500	27,86	14.219.900	27,86	1,54	82,17	7.084.612.919	82,17	42,03	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	100	5.641.840.400	69	4.224.524.579	100	1.440.629.000	36,52	139.339.800	36,52	9,67	78,55	4.363.864.379	78,55	77,35	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luasan daerah pertanian yang tertanggulangi dari serangan hama penyakit dan dampak perubahan iklim.	Persen	100	2.629.369.600	80	2.024.954.425	100	925.000.000	-	170.529.000	-	18,44	100	2.195.483.425	100,00	83,50	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit (%)	%	25	950.000.000	20	896.520.200	25	430.000.000,00	0	14.710.000,00	0,00%	3,42%	20,00	911.230.200	80,00 %	95,92%	Dinas Perkebunan
3.27.6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Penilaian Usaha Perkebunan (%)	%	30	400.000.000	20	399.547.000	30	1.407.421.600,00	0	0,00	0,00%	0,00%	20,00	399.547.000	66,67 %	99,89%	Dinas Perkebunan
3.27.6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase UMKM Subsektor Peternakan yang Memenuhi Standar	%	100	574.050.100	75	615.288.800	100	158.556.000	40,00	7.146.700	40,00	4,51	85,00	622.435.500	85,00	108,43	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.27.7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pesentase pelaksanaan penyuluhan pertanian.	Persentase	100	16.116.750.000	80	8.985.278.820	100	1.800.000.000	5	499.493.000	5,00	27,75	85	9.484.771.820	85,00	58,85	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Mutu Produk Perkebunan (%)	%	20	3.418.617.500	15	3.349.867.935	20	7.080.634.400,00	0	191.623.100,00	0,00%	0,00%	15,00	3.541.491.035	75,00 %	103,59 %	Dinas Perkebunan
3.27.7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Ternak yang Mendapat Pendampingan Peternakan	%	100	4.066.207.500	66,91	2.192.837.350	100	655.062.000	35,00	9.667.600	35,00	1,48	73,14	2.202.504.950	73,14	54,17	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
<b>3,28</b>	<b>KEHUTANAN</b>																	
3.28.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	100	270.654.894.420	100	122.750.729.365	100	63.150.943.455	28	17.687.939.801	46	28,01	146	151.733.791.329	145,89	56,06	Dinas Kehutanan
3.28.3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luas Tutupan Lahan	Hektar	104.106	33.047.764.500	438	12.357.554.678	231	2.250.745.700	0	274.909.200	-	12%	438	12.357.554.678	0,42	37,39	Dinas Kehutanan
3.28.4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas areal yang telah dipulihkan	Hektar	192	8.527.906.300	35	1.832.348.810	35	665.743.000	4	85.472.800	7	13%	42,31	1.832.348.810	22,04	21,49	Dinas Kehutanan
3.28.5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	%	25	29.771.865.700	5	5.995.027.499	5	1.422.931.200	1	316.843.900	1	22%	6,17	5.995.027.499	24,66	20,14	Dinas Kehutanan

3.28.6	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	%	100	3.627.773.425	25	533.759.674	25	103.915.000	0	947.800	0	0,91%	25,23	533.759.674	25,23	14,71	Dinas Kehutanan
3.29	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>																	
3.29.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	%	100,00	67.205.742.683,0 0	100	32.772.389.957,0 0	100,00	17.103.454.418,5 0	45,13	7.719.511.845,0 0	26,65	28,12	90,97	40.491.901.802,0 0	102,77	55,17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian	%	100,00	2.832.669.000,00	100	1.448.285.612,00	100,00	675.000.000,00	22,12	149.328.250,00	49,18	49,18	124,59	1.597.613.862,00	124,59	56,40	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara	%	60,00	1.085.973.000,00	50,00	494.629.900,00	60,00	1.280.331.200,00	0,00	338.185.451,00	0,00	51,83	17,00	832.815.351,00	38,64	77%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Bauran Energi Daerah	%	34,80	1.152.092.000,00	33,50	1.073.910.690,00	34,80	1.400.000.000,00	11,43	321.529.400,00	11,43	135,57	12,23	1.395.440.090,00	35,14	121%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi	%	100,00	10.031.000.600,0 0	100	2.142.557.511,00	100,00	1.674.668.800,00	25,42	469.642.000,00	101,67	105,97	501,67	2.612.199.511,00	501,67	229,86	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.30	<b>PERDAGANGAN</b>																	
3.30.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	81.933.670.811	100	35.413.207.093	100	17.732.324.943,6 0	50	7.116.356.371	50%	40,13%	50	7.116.356.371	50%	8,69%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3.30.3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Transaksi Dalam Pasar Lelang	%	25	175.000.000	20	58.539.610	25	75.000.000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nilai Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antarwaktu	%	5,5	1.763.000.000	5,5	4.071.460.795	5,5	916.000.000	2,75	657.405.030	50%	71,77 %	2,75	657.405.030	50%	37,29%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Produk Unggulan Yang Memperoleh Fasilitas Promosi Dagang	Produk	40	422.696.000	0	0	10	556.400.000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Cakupan Barang Beredar Yang Diawasi	%	20	3.408.330.000	17,5	410.562.285	17,5	1.000.720.000	8,75	178.658.000	50%	17,85 %	8,75	178.658.000	43,75 %	5,24%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM/PKM Unggulan/Potensial Yang Memperoleh Fasilitas Pemasaran	%	40	3.318.795.000	40	1.922.420.699	10	375.000.000	5	47.082.200	50%	12,56 %	5	47.082.200	12,50 %	1,42%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
<b>3.31</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>																	
3.31.2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri di Provinsi	%	2	29.995.861.000	0,5	15.384.912.326	0,5	5.313.513.500	0,25	301.219.780	50%	5,67%	0,25	301.219.780	12,50 %	1,00%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar Yang Dipantau dan Dianalisis Dalam Laporan Hasil Pemantauan Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%	25	923.569.000	20	398.872.149	25	175.000.000	0	14.699.000	0%	8%	0	14.699.000	0%	1,59%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3.31.4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Perusahaan Industri Besar dan Perusahaan Kawasan Industri Kab/Kota Yang Masuk SIINAS	%	45	457.198.000	40	126.296.550	45	93.995.000	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.32	<b>TRANSMIGRASI</b>																	
3.32.2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penyelesaian pemilikan lahan di 1 (satu) Kawasan Transmigrasi	%	100	206.134.200	100,00	266,82	100	100.000.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
3.32.3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon peserta transmigrasi yang difasilitasi untuk dibina di 2 (dua) kawasan transmigrasi	%	100	208.060.000	100,00	42,89	100	175.000.000	0	3.509.000	0,00	2,01	0	3.509.000	0,00	1,69	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
3.32.4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase identifikasi sarana dan prasarana di 1 (satu) kawasan transmigrasi	%	100	200.194.530	100,00	98,90	100	125.000.000	100	84.050.000	100,00	67,24	100	84.050.000	100,00	41,98	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
4	<b>UNSUR PENDUKUNG</b>																	
4.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>																	
4.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Tata Kelola Pemerintah Yang Tersusun	%	100	2.046.410.000		1.901.658.500	100	1.121.328.700	18,89%	245.651.295	18,89%	29,56%		2.233.071.397	13,54%	107,58%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

4.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	7.442.999.068,50	100	4.230.480.115,00	100%	1.671.489.700,00	45,5%	453.229.628,00	45,50 %	27,12 %	45,50%	4.683.709.743,00	45,50 %	62,93%	Biro Organisasi
4.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	3.098.353.700	88,53	2.954.253.053	100	823.609.000	28,34%	268.839.900	28,34 %	32,64 %	28,34%	3.223.092.953	87,53 %	104,03 %	Biro Kesejahteraan Rakyat
04:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	%	100%	8.309.318.960	100	3.527.551.697	100	1.355.081.876	8,33	49.322.506	8,33%	14,34 %	8,3%	3.576.874.203	8,3%	43,0%	Biro Hukum
4.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaporan Capaian Kerumahtangaan, Administrasi Keuangan dan Aset, serta Ketatausahaan yang tepat waktu	%	100	657.637.571.541	73,05	493.607.049.610	100	172.460.697.620	44,24	73.702.667.415	44,24	42,74	44,24	567.309.717.025	44,24	86,26	Biro Umum
4.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keselarasan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	%	100%	7.442.999.068,50	100	4.230.480.115,00	100%	1.671.489.700,00	45,5%	453.229.628,00	45,50 %	27,12 %	45,50%	4.683.709.743,00	45,50 %	62,93%	Biro Perekonomian
4.01.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah di Biro Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	19.917.524.418	78,42	13.051.382.579	100	3.950.000.000	13,33	488.124.720	13,33	12,36	91,75	13.539.507.299	91,75	67,98	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	3.403.447.678	90,91	1.287.946.700	100%	910.879.000	32,85%	120.579.733	32,85 %	13,24 %	32,85%	1.408.526.433	32,85 %	41,39%	Biro Administrasi Pembangunan

4.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah melalui keprotokolkan dan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan	%	100%	7.348.661.064	100%	11.444.412.328	100%	6.800.000.000	37,73%	1.981.842.483	37,73 %	29,14 %	37,73%	13.426.254.811	37,73 %	182,70 %	Biro Administrasi Pimpinan
4.01.2	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjamb, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, Tatalaksana dan pelayanan publik) yang sesuai dengan peraturan berlaku	%	100%	5.530.723.000,00	100	3.950.124.725,00	100%	1.328.510.300,00	27,22%	741.381.470,00	27,22 %	55,81 %	27,22%	4.691.506.195,00	27,22 %	84,83%	Biro Organisasi
4.01.3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	3.500.000.000	98,05	1.594.819.500,00	100	1.215.589.300	8,33%	389.142.600	8,33%	39,68 %		423.109.000	148,33 %	63,63%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.4	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	%	100	177.843.024.939	98,05	174.414.062.769,06	100	75.818.205.000	23,48%	18.205.290.250	23,48 %	25,69 %	23,48%	181.181.756.126	23,48 %	101,88 %	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.5	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan dan Sengketa Hukum yang di fasilitasi	%	100%	6.076.936.080	100	3.050.811.460	100	1.220.259.124	10,32	187.867.519	18,55 %	28,05 %	18,55%	3.238.678.979	18,6%	53,3%	Biro Hukum
4.01.6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Keselarasan Kebijakan Pembangunan Ekonomi yang Ditindaklanjuti	%	100%	5.530.723.000,00	100	3.950.124.725,00	100%	1.328.510.300,00	27%	741.381.470,00	27,22 %	55,81 %	27,22%	4.691.506.195,00	27,22 %	84,83%	Biro Perekonomian

4.01.7	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase paket pekerjaan yang selesai ditenderkan	%	100	12.574.411.884	75	6.857.328.989	100	2.449.824.700	16,67	188.016.000	16,67	7,67	91,67	7.045.344.989	91,67	56,03	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.8	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pembangunan yang tertib administrasi	%	100%	9.201.000.000	87,84	3.302.433.334	90%	1.089.121.000	25,00%	116.914.900	27,78 %	10,73 %	27,78%	3.419.348.234	27,78 %	37,16%	Biro Administrasi Pembangunan
<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>																	
4.02.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Layanan Administrasi Umum DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	%	100%	Rp 162.611.257.712	100%	Rp 167.102.786.874	100%	Rp 172.932.114.712	49%	Rp 76.522.219.631	49%	44,25 %	49,02%	Rp 243.625.006.505	49,02 %	149,82 %	Sekretariat DPRD
4.02.2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	%	100%	Rp 192.388.742.288	100%	Rp 238.798.867.732	100%	Rp 217.067.885.288	0,40	Rp 120.280.215.461	39,56 %	55,41 %	39,56%	Rp 359.079.083.193	39,56 %	186,64 %	Sekretariat DPRD
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG</b>																	
<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>																	
5.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100%	65.165.361.946	100	56.958.762.436	100%	25.895.131.665	30,83%	6.366.093.956	30,83 %	15,81 %	30,83%	63.324.856.392	30,83 %	97,18%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.2	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100%	17.662.188.551	100	5.329.480.800	100%	5.502.058.600	29,17%	412.479.350	29,17 %	5,06%	29,17%	7.578.618.600	29,17 %	42,91%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



5.01.3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan money pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	%	100%	23.185.808.566	100	7.918.275.400	100%	6.852.865.500	7,29%	465.448.561	7,29%	6,10%	7,29%	8.383.723.961	7,29%	36,16%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>																	
5.02.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	437.621.242.339,00	93,21	308.465.098.211,00	100	112.295.038.829,65	20,11%	45.726.712.432,00	20,11%	40,72%	20,11%	354.191.810.643,00	74,13%	80,94%	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar dan Pendukung Pada Badan Pendapatan Daerah	%	100	452.908.852.053,00	81	219.008.385.307	100	119.386.301.761,10	40,49	50.526.811.656	40,49	42,32	40,49	269.535.196.963	40,49	59,51	Badan Pendapatan Daerah
5.02.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	%	100	5.753.782.173.710,00	100,00	3.673.658.769.346,00	100	1.796.471.896.594,63	21,36%	567.040.906.007,00	36,46%	31,56%	36,5%	4.240.699.675.353,00	81,60%	73,70%	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	%	100	28.917.332.982,00	100	17.401.785.790,00	100	7.446.888.520,00	0	1.420.966.306,00	0,00%	19,08%	0,0%	18.822.752.096,00	75,00%	65,09%	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

5.02.4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah	%	100	78.507.609.500	100	26.295.994.269	100	18.712.184.800	38,15	4.525.480.310	38,15	31,14	38,15	30.821.474.579	38,15	39,26	Badan Pendapatan Daerah
<b>5,03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>																	
5.03.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	109.163.441.577	100	16.940.243.521	100%	15.958.062.751	44,26%	7.684.283.555	44,26 %	48,15 %	44,26%	24.624.527.076	44,26 %	22,56%	Badan Kepegawaian Daerah
5.03.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian	%	100%	39.607.994.561	100	8.654.594.116	100%	8.730.376.960	32,08%	1.883.467.512	32,08 %	21,57 %	21,57%	10.538.061.628	21,57 %	26,61%	Badan Kepegawaian Daerah
<b>5,04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>																	
5.04.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	80.089.077.239	98,44	45.592.566.373	100	20.335.847.641,60	41,39	8.457.040.238	41,39	41,59	69,92	54.049.606.611	69,92	67,49	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM yang ditingkatkan	%	100	59.329.929.600	89,04	24.883.455.933	100	23.328.662.829,86	21,10	1.070.106.894,00	21,10	4,59	55,07	25.953.562.827	55,07	43,74	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5,05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>																	
5.05.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	40.977.750.046	100	20.438.562.584	100	9.385.934.806	20,72%	4.199.238.916	20,72 %	44,74 %	20,72%	24.630.801.500	79,85 %	60,11%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

5.05.2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase rumusan kebijakan program penelitian dan pengembangan daerah	%	100	11.564.732.282	100	6.089.709.550	100	2.630.579.251	0,00%	464.650.000	0,00%	17,66 %	0,00%	6.554.359.550	68,63 %	52,75%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.07	<b>PENGHUBUNG</b>																	
5.07.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	% pelaksanaan kegiatan penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	76.773.612.861	96,67	50.739.044.386	100	17.726.242.764	33,20	6.960.805.608	33,20	22,17	33,20	57.699.849.994	33,20	75,16	Badan Penghubung
5.07.2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	% tingkat kepuasan masyarakat Lampung di luar daerah terhadap pelayanan Badan Penghubung	%	100	6.351.361.180	100	3.885.756.250	100	1.939.985.000	16,67	208.583.600	16,67	12,72	16,67	4.094.339.850	16,67	64,46	Badan Penghubung
6	<b>UNSUR PENGAWASAN</b>																	
6.01	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>																	
6.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	133.987.983.208	96,05	62.643.713.056	100	54.797.958.049	13,48%	865.089.645	13,94 %	1,58%	13,94%	63.508.802.701	75,25 %	47%	Inspektorat
6.01.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti	%	88	31.914.610.000	78,12	7.132.733.972	86%	6.772.888.000	22,28%	503.344.600	25,91 %	7,43%	25,91%	7.636.078.572	45,00 %	23,93%	Inspektorat
6.01.3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks SPIP Perangkat Daerah	Indeks	3,1	4.392.198.000	3,12	1.166.808.661	3,03	967.945.000	3,19	133.442.000	105,28 %	13,79 %	3,19	1.300.250.661	102,90 %	29,60%	Inspektorat
8	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>																	
8.01	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>																	

8.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	75	65.928.176.512,00	70	27.217.236.733,00	75	391.638.688.014,60	137	328.883.489.664,00	35,76 %	26,67 %	137	356.100.726.397,00	47,28 %	76,77%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	%	30	3.968.918.500,00	25	1.537.619.300,00	30	2.750.245.200,00	15	355.239.850,00	20,00 %	3,30%	15	1.892.859.150,00	40,28 %	51,79%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.3	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	%	30	2.098.751.900,00	25	636.275.300,00	30	1.200.000.000,00	15	65.035.000,00	6,31%	3,34%	15	701.310.300,00	39,31 %	74,88%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.4	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	%	30	703.601.300,00	25	312.378.000,00	30	415.000.000,00	0	0,00	0,00%	0,00%	0	312.378.000,00	34,77 %	50,78%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.5	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	30	2.345.375.000,00	25	1.013.550.900,00	30	835.000.000,00	15	50.230.000,00	5,29%	3,20%	15	1.063.780.900,00	44,68 %	71,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.6	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Provinsi Lampung	%	30	4.433.739.200,00	25		30	1.000.000.000,00	0	0	0,00%	0,00%	0	1.281.890.817	33,90 %	51,94%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



### **BAB III KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN EVALUASI RKPD PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN II TAHUN 2024**

Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2024 telah dilaksanakan melalui pencermatan dan pendalaman terhadap dokumen Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan menginput capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam aplikasi Simonev Bappeda Provinsi Lampung. Pencermatan dan pendalaman tersebut menghasilkan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Perangkat daerah telah melakukan penginputan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait Renja Tahun 2024 Triwulan II, dalam penginputan ke dalam tabel t.c19, agar admin tiap OPD harus lebih memperhatikan tabel terkait keterangan, karna tabel keterangan sangatlah penting untuk setiap OPD dapat menjelaskan apa yang terjadi dalam tiap output/sub kegiatan. Jika memperhatikan di Triwulan II Tahun 2024, ada sub kegiatan yang anggaran sudah ter-realisis tetapi kinerja/ fisiknya belum ada sehingga perlu ada ketegasan dan kejelasan terkait hal tersebut.
2. Dikarenakan Peralihan dari Aplikasi SIPPKD milik daerah Provinsi Lampung beralih pada Aplikasi SIPD RI, sehingga data Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan yang biasanya diambil dari SIPPKD tidak tersedia pada aplikasi simonev dan Perangkat Daerah harus menginput manual menggunakan Excel, menyebabkan kurang optimalnya pengumpulan Evaluasi Renja Perangkat daerah, Maka dari itu Simonev Perlu terintegrasi dengan SIPD RI untuk mengoptimalkan Kembali Apliasi Simonev.
3. Perangkat Daerah untuk dapat menyesuaikan waktu (jadwal pelaporan) sehingga keterlambatan dapat diminimalisir dan menjadikan dokumen Evaluasi RKPD Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.